

PERAN E-GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA

THE ROLE OF E-GOVERNANCE AS AN INSTRUMENT TO ENHANCE
GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN INDONESIA

<https://10.52617/jaid.v5i1.731>

Submitted: 07-04-2025 Reviewed: 25-04-2025 Published: 19-05-2025

Sierra Aulia Shabihah
shabihah.sierra@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Mochammad Ryanindityo
ryanindityo@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Intan Nurkumalawati
intannurkumala1@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract. Digital transformation in government through e-governance is an important step in supporting bureaucratic reform and realizing good governance. This research aims to analyze the strategic role of e-governance in improving government transparency and accountability in Indonesia. Using qualitative methods through literature studies and case studies, this research examines various e-governance implementations in various regions. The results show that e-governance plays a strategic role in improving government transparency and accountability, which are the two main pillars in realizing good governance. The implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) in a number of regions such as Ciamis Regency, Bandung City, and DKI Jakarta has a positive impact on access to public information, service efficiency, and citizen participation. Digital innovations such as the "Helo Ciamis" application, the 'JAKI' platform, and the "Open Data Jakarta" program have proven to encourage information disclosure and strengthen public oversight of government performance. However, the implementation of e-governance still faces challenges in the form of limited technological infrastructure, low public digital literacy, and resistance to change from bureaucratic apparatus. Thus, alignment between national policy and implementation at the local level is needed, increasing the capacity of human resources and strengthening public participation.

Keywords: e-governance, transparency, accountability, good governance, public service

Abstrak. Transformasi digital dalam pemerintahan melalui e-governance menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis e-governance dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus, penelitian ini menelaah berbagai implementasi e-governance di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan e-governance memainkan peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sejumlah daerah seperti Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, dan DKI Jakarta berdampak positif terhadap akses informasi publik, efisiensi layanan, dan partisipasi warga. Inovasi digital seperti aplikasi "Helo Ciamis", platform "JAKI", dan program "Open Data Jakarta" terbukti mendorong keterbukaan



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

informasi serta memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Namun, implementasi *e-governance* masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan resistensi perubahan dari aparatur birokrasi. Sehingga diperlukan keselarasan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan partisipasi publik.

Kata Kunci: *e-governance*, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, pelayanan publik

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan tata kelola dan mewujudkan pemerintahan yang bermataabadi di mata masyarakat, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dalam administrasi publik (Mustapa, 2011). Salah satu bentuk reformasi birokrasi tersebut adalah transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik dan sistem administrasi pemerintahan. Transformasi digital administrasi publik telah berkembang melalui penerapan konsep *e-governance*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

E-governance diyakini mampu mendorong perubahan fundamental dalam cara kerja birokrasi, khususnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta supremasi hukum (Yuliyanti et al., 2022). Untuk memahami hal tersebut lebih jauh, penting untuk melihat bagaimana *e-governance* didefinisikan. *E-governance* merujuk kepada bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Puji Lestari et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan implementasi *e-governance* dalam tata kelola pemerintahan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan birokrasi (Puji Lestari et al., 2022).

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan *e-governance* telah ditetapkan secara jelas, namun peran *e-governance* sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Padahal transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam pelayanan publik sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Harsini, 2018). Sehingga dalam konteks pelayanan publik, *e-governance* tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai strategi reformasi yang krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi yang mendalam mengenai sejauh mana *e-governance* benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas yaitu di berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan *e-governance* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pendekatan digital. Dengan demikian penting untuk menelaah lebih lanjut peran strategis *e-governance* dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama *good governance*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus untuk menganalisis peran *e-governance* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena *e-governance* merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam melalui analisis teoritis serta kajian empiris terhadap implementasinya dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta studi kasus implementasi *e-governance*. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi sejauh mana *e-governance* berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui perbandingan praktik dan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas *e-governance* sebagai instrumen reformasi birokrasi dan *good governance* di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis (Tahun)	Judul Riset	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
Saputri dan Pertiwi (2025)	Inovasi Pelaksanaan <i>Government To Employee (G2E)</i> Melalui Portal Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Kualitatif (studi kasus)	Portal data meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan kinerja, dan memotivasi pegawai. Terdapat hambatan seperti resistensi perubahan

			dan keterbatasan teknologi.
Fikri dan Tjenreng (2025)	Manajemen Pelayanan Publik	Kualitatif (studi literatur)	Digitalisasi, pelatihan SDM, dan <i>e-government</i> penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, namun masih ada kendala birokrasi dan disparitas wilayah.
Majid (2021)	Kontribusi Teori <i>Contingency</i> : Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui <i>E-Government</i> di Indonesia	Kualitatif (fenomenologi interpretif)	Penerapan <i>e-government</i> berbeda tiap daerah; perlu update sistem dan evaluasi berkala untuk efektivitas tata kelola pemerintahan.
Kennedy et al. (2024)	Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka <i>Good Governance</i> di Indonesia	Yuridis normatif	Sumber hukum formal dan material HAN penting untuk <i>good governance</i> , tapi masih ada tantangan regulasi dan pengawasan.
Suwidyanti (2023)	Peran <i>Good Governance</i> Melalui Reformasi Birokrasi dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja di Kota Surabaya	Kualitatif (deskriptif analitis)	Konsep kontrak kerja dan <i>e-government</i> membantu reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Sumber: Saputri dan Pertiwi (2025); Fikri dan Tjenreng (2025); Majid (2021); Kennedy et al. (2024); Suwidyanti (2023)

Penelitian implementasi *e-government* dan *good governance* dalam meningkatkan kinerja pemerintahan telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai sudut pandang. Saputri dan Pertiwi (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inovasi digital melalui Portal Data Kinerja di Kabupaten Sidoarjo mempercepat proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mendorong motivasi pegawai dalam mencapai target kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan hambatan resistensi

terhadap perubahan dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Sementara itu, Fikri dan Tjenreng (2025) menjelaskan manajemen pelayanan publik terintegrasi dengan teknologi digital menjawab ketimpangan pelayanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui studi literatur, kesimpulan diambil menunjukkan reformasi birokrasi, penguatan SDM, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik responsif dan efisien.

Majid (2021) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan fenomenologi interpretif untuk menelusuri kontribusi teori kontingensi dalam penerapan *e-government* di berbagai kota di Indonesia. Penerapan sistem digital bergantung pada situasi dan karakteristik masing-masing daerah, sehingga diperlukan adaptasi dan evaluasi. Tekanan pada fenomena terhadap hukum dikemukakan oleh Kennedy et al. (2024), yaitu sumber hukum formal maupun material memainkan peran dan penjelasan dalam terciptanya tata kelola pemerintahan baik. Di sisi lain, Suwidyanti (2023) menunjukkan konsep kontrak kerja dikombinasikan dengan *e-government* di Surabaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Secara keseluruhan, berbagai penelitian menjelaskan adanya integral antara teknologi, regulasi, dan manajemen sumber daya manusia menentukan keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di era digital.

3.2. Konsep Dasar *E-Governance*

Penerapan *e-governance* adalah jawaban kebutuhan transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan. *E-governance* atau dalam hal ini “tata kelola elektronik” merujuk kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai Tingkat pemerintahan dan sektor publik, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan (Palvia dan Sharma, 2007). Hal ini juga sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh UNESCO, yang menyebutkan bahwa *e-governance* adalah penggunaan teknologi komunikasi oleh sektor publik dengan tujuan untuk meningkatkan penyampaian informasi dan layanan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif.

Dalam konteks pemerintahan, *e-governance* dan *e-government* memiliki makna dan konsep yang sejalan namun berbeda dalam penggunaannya. Zweers dan Planque dalam (Putri, 2015) mendefinisikan *e-government* sebagai penyediaan informasi dan layanan yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta menawarkan nilai yang tinggi untuk partisipasi seluruh kalangan. Sementara itu, *e-governance* mencakup aspek yang lebih luas, yaitu bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Puji Lestari et al., 2022). Dengan kata lain, *e-government* lebih menekankan pada penggunaan teknologi untuk penyediaan layanan, sedangkan *e-governance* mencerminkan perubahan dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jika pemerintah hanya berfokus pada *e-government* tanpa memperhatikan prinsip *e-governance*, maka transformasi digital hanya akan

berorientasi pada layanan tanpa adanya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat (Grigalashvili, 2022). Sebaliknya, penerapan *e-governance* tanpa dukungan sistem *e-government* yang kuat dapat menghambat efektivitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

3.3. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar *Good Governance*

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal pokok dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hartanto et al. (2021) menunjukkan *transparency* dan *accountability* berpengaruh terhadap persepsi publik dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dan tanggung jawab pejabat publik memberi dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika informasi disampaikan dengan jujur dan pejabat bersikap terbuka terhadap tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menilai pemerintah lebih dapat dipercaya.

Idrus et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang terbuka mampu meningkatkan kualitas layanan dan membuat proses kerja pemerintahan lebih efisien. Dalam beberapa studi kasus, pelayanan publik membaik setelah prinsip *good governance* seperti *transparency* dan *accountability* dijalankan dengan konsisten. Keterbukaan tidak hanya mencegah korupsi, tapi juga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam perbaikan kebijakan. Ketika publik merasa dilibatkan, layanan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Meskipun penting, penerapan prinsip *good governance* masih menghadapi kendala di tingkat desa. Hambatan geografis, buruknya komunikasi, dan kurangnya koordinasi membuat pemerintah desa kesulitan menjaga hubungan dengan warga. Akibatnya, pelaporan keuangan dan kegiatan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menciptakan jarak antara aparat dan Masyarakat (Sucihati et al., 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan warga dalam pengelolaan sumber daya agar proses pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Bahkan dalam penelitian Ernalis et al. (2024) menyebutkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya berjalan secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit dan kesulitan mengakses informasi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan menyebabkan program pemerintah sering kali tidak tepat sasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *good governance*, upaya perbaikan pelayanan publik akan sulit tercapai.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan *good governance* yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, tidak hanya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah meningkat, tetapi juga efisiensi dan kualitas layanan publik dapat terwujud. Namun berbagai tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya komitmen yang besar dari pemerintah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

3.4. Peran *E-Governance* dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat. Penelitian Ratna et al. (2024) menunjukkan implementasi *e-government* di Kabupaten Ciamis melalui sistem SPBE mampu mempercepat proses layanan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Aplikasi “Helo Ciamis” menjadi contoh nyata inovasi pelayanan digital, mempermudah akses informasi dan mengintegrasikan layanan dari berbagai OPD dalam satu platform. Sistem SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) memperkuat akuntabilitas dengan memberi masyarakat akses terhadap kinerja pelayanan secara terbuka.

Studi Pangestu et al. (2024) di Kota Bandung menekankan *e-governance planning* sebagai langkah penting untuk menghadirkan layanan efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks SPBE meningkat setiap tahun karena pengelolaan data yang aman, pengujian keamanan (*penetration testing*), serta pengawasan dari Diskominfo. Evaluasi berkala dan koordinasi antarlembaga mendorong kualitas layanan digital yang dapat dipercaya. Bandung termasuk kategori “sangat baik” dalam implementasi SPBE berdasarkan penilaian pemerintah pusat, yang menunjukkan keberhasilan kota tersebut dalam membangun sistem pemerintahan digital yang transparan dan akuntabel.

Penelitian Arkaan et al. (2024) melalui studi di DKI Jakarta menunjukkan transparansi melalui program *Open Data Jakarta* dan aplikasi JAKI menjadi langkah besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Informasi kinerja pemerintahan tersedia secara real-time, dan masyarakat dapat mengawasi proses administrasi langsung. Fitur seperti *JakRespons* dan *JakLapor* memberi ruang bagi warga menyampaikan pengaduan yang diproses terbuka oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, melainkan juga partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.

E-governance telah terbukti menjadi instrumen strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui sistem digital yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka, mengakses layanan dengan mudah, serta ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Tujuan utama dari *e-governance* adalah untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam sistem pemerintahan (UNESCO dalam Palvia dan Sharma (2007)). Keberhasilan beberapa daerah seperti Ciamis, Bandung, dan Jakarta menunjukkan bahwa ketika teknologi dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi, maka prinsip *good governance* dapat lebih mudah diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dukungan kebijakan

yang kuat, literasi digital masyarakat, dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan *e-governance* sebagai pilar utama reformasi birokrasi.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa *e-governance* memainkan peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan *good governance*.

Keberhasilan dalam implementasi *e-governance* sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan.

4.2. Saran

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan, agar pelaksanaan *e-governance* dapat merata dan inklusif.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus diperkuat melalui keterbukaan informasi dalam proses pemerintahan untuk mendukung implementasi *e-governance*.

Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya *good governance* melalui implementasi *e-governance*.

REFERENSI

- Grigalashvili, V. (2022). E-government and E-governance: Various or Multifarious Concepts. *International Journal of Scientific and Management Research*, 05(01), 183–196. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2022.5111>
- Harsini, H. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 65–71. <https://doi.org/10.31849/ni.v10i2.1903>
- Mustapa, Z. (2011). Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ? *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.29>
- Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2007). *E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around The World*. 1–12.
- Puji Lestari, I., Moh Nazar Fajri, L., & Penelitian Abstrak, A. (2022). Analisis E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Solusi Ilmiah Keijakan Dan Administrasi Publik*, 08, 10–23. www.Lomboktimurkab.go.id
- Putri, N. E. (2015). *Kendala dan Strategi Pelaksanaan E government dalam Pembangunan Daerah*.
- Yuliyanti, F., Radjikan, R., & Santoso, T. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1288–1293. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.123>
- Fikri, M. A. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). *Manajemen Pelayanan Publik*. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 291–304.
- Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). *Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia*. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 558–569.
- Majid, J. (2021). *Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government di Indonesia*. *ASSETS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 186–205.
- Saputri, R. N. J., & Pertiwi, V. I. (2025). *Inovasi Pelaksanaan Government To Employee (G2E) Melalui Portal Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3068–3078.
- Suwidyanti, N. (2023). *Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja di Kota Surabaya*. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530–533.
- Saputri, R. N. J., & Pertiwi, V. I. (2025). *Inovasi Pelaksanaan Government to Employee (G2E) melalui Portal Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3068–3078.

- Zulfiani, Y. N. (2022). Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia: Perluakah Urgensi Pembaharuan? *Palangka Law Review*, 2(2), 89–102. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4666>
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024). Optimalisasi Prinsip Good Governance untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bireuen. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(1), 167–171. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP>
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: A case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23(4), 355–373. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- Idrus, S. H., Akib, H., & Kesuma, A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Prinsip Good Governance: Tinjauan dari Perspektif Lokal dan Global. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 8(2), 2194–2198.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, & Suprianto. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Samalewa: Jurnal Riset dan Kajian Manajemen*, 1(1), 54–57.
- Sari, A. Z. P., Natalia, N. G., Cahya, R. W. N., & Rudiana. (2023). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 2(2), 185–192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.660>
- Arkaan, G. A., Marfariza, H. A., Fairuzyah, I. N., Suhendar, M. I. P., & Khoirunnisa, S. (2024). Building Public Trust Through E-Governance Strategy: A Case Study in DKI Jakarta, Indonesia. *Social Impact Journal*, 3(2), 32–41. <https://journal.goresearch.id/index.php/sij/index>
- Pangestu, A. B., Koswara, A., Rismansyah, A., Yusman, D. H., Hermawan, F. A., & Idris, F. (2024). E-Governance and Development Planning: Case Study of Bandung City. *Social Impact Journal*, 3(2), 22–31. <https://journal.goresearch.id/index.php/sij/index>
- Ratna, H., Setiawan, A., Kustiawan, M. R., & Nursetiawan, I. (2024). Implementation of E-Government to Improve Public Transparency in the Provision of Integrated Services in Ciamis Regency. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 438–447. <http://jurnaldialektika.com/>